

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Bencana adalah sebuah anugerah dan tantangan yang harus dihadapi oleh manusia yang tinggal di bumi ini, terutama di daerah-daerah yang rawan bencana. Indonesia merupakan negara yang dilalui oleh cincin api (*ring of fire*) yang terletak di wilayah lingkaran api pasifik, dimana wilayah tersebut merupakan pertemuan tiga lempeng tektonik dunia, seperti lempeng Indo-Asutralia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Itulah sebabnya, dengan posisi geologis dan geografisnya, Indonesia memiliki risiko tinggi terhadap bencana alam (Trisnawati, 2023). Bahkan menurut data, Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki tingkat kegempaan yang tinggi di dunia (BNPB 2017) (Irwan, 2023). Handayaningsih (2018) menyebutkan bahwa bencana adalah kejadian yang menyebabkan kerusakan, kerugian, dan penderitaan (Trisnawati, 2023).

Menurut *United Nations-International Strategy for Disaster Reduction* (UN-ISDR) mengartikan bencana sebagai sebuah gangguan serius terhadap fungsi suatu komunitas atau masyarakat yang melibatkan kerugian dan dampak yang luas terhadap manusia, material, ekonomi atau lingkungan, yang melampaui kemampuan komunitas atau masyarakat yang terkena dampak untuk mengatasinya dengan menggunakan sumber dayanya sendiri (KWA, 2023). Sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Dalam definisi tersebut, suatu peristiwa dianggap sebagai bencana jika dapat mengancam kehidupan dan mata pencarian, serta menimbulkan korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian material, dan dampak psikologis (UU RI No 24 Tahun 2007).

Dalam perspektif sosiologi, bencana didefinisikan sebagai fenomena yang secara signifikan mengganggu struktur sosial dan fungsi kehidupan masyarakat. Bencana tidak hanya dilihat dari kerusakan fisik atau material, tetapi juga dari pengaruhnya terhadap struktur sosial, hubungan antarindividu, dan kehidupan komunitas secara keseluruhan. Dari sudut pandang ini, bencana dianggap sebagai fenomena yang dapat mempengaruhi norma sosial, nilai-nilai, dan interaksi dalam masyarakat. Bencana dapat merubah dinamika sosial, mengganggu aktifitas sehari-hari, serta menguji kemampuan individu, komunitas, dan masyarakat dalam beradaptasi dan bertahan dalam situasi krisis. Selain itu, bencana sering kali memperlihatkan ketidaksetaraan sosial dan berbagai masalah struktural dalam masyarakat. Dengan demikian, sosiologi melihat bencana sebagai fenomena yang tidak hanya menimbulkan kerugian fisik dan material, tetapi juga berdampak mendalam pada struktur sosial dan kesejahteraan komunitas atau masyarakat (Widodo et al., 2020). Sementara itu, (Pramono, 2016) menjelaskan bahwa dari sudut pandang sosiologis, bencana sering dipahami berdasarkan persepsi dan pengalaman emosional masyarakat terhadap peristiwa yang mengancam kelangsungan hidup mereka. Bencana merupakan bagian dari definisi yang dibentuk dalam konteks sosial dan budaya kehidupan masyarakat yang mengalaminya.

Akhir-akhir ini bencana di Indonesia eskalasinya meningkat, khususnya di Sumatera Barat. Sebagaimana yang kita ketahui semenjak penghujung tahun 2023 hingga pertengahan tahun 2024 ini ranah Minang tidak henti-hentinya dilanda berbagai bencana, mulai dari meletusnya Gunung Marapi pada tanggal 3 Desember 2023 tepatnya pada pukul 14.55 WIB telah terjadi letusan gunung Marapi di provinsi Sumatera Barat. Menurut data dari BPBD Kota Bukittinggi, terdapat 75 orang yang mendaki di gunung Marapi 52 diantaranya berhasil selamat, 23 orang dinyatakan meninggal dunia. Kemudian, pada tanggal 11 Mei 2024 terjadi banjir disertai Galodo dan lahar dingin yang melanda beberapa daerah di Sumatera Barat, seperti Kabupaten Tanah Datar, tepatnya di lima kecamatan antara lain X Koto, Pariangan, Limo Kaum, Batipuh, dan Sungai Tarab. Selain itu, banjir juga terjadi di beberapa kecamatan di Kabupaten Agam, seperti Kecamatan Sungai Pua dan

Kecamatan Canduang yang diterpa banjir lahar dingin. Sementara kecamatan lainnya, seperti Kecamatan Tanjuang Raya, Kecamatan Banuhampu, dan Kecamatan IV Koto dilanda banjir akibat tingginya intensitas hujan. Daftar korban jiwa pascagalodo di wilayah Sumatera Barat berdasarkan catatan Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) BNPB 62 orang meninggal dunia dan 10 orang warga Kabupaten Tanah Datar dilaporkan hilang. Salah satu kerugian yang paling dirasakan dampaknya bagi seluruh kalangan masyarakat di Sumatera Barat adalah lumpuhnya akses jalan di Silaiang, Tanah Datar yang menghubungkan jalan lintas Bukittinggi – Padang. Sebagaimana yang kita ketahui jalan tersebut adalah jalur utama lintas Sumatera yang menghubungkan antar kota di Sumatera Barat dan menghubungkan antar provinsi dikarenakan jalan tersebut merupakan jalan nasional.

Menurut Data Bencana Indonesia dari BNPB yang bersumber dari website Geoportal Data Bencana Indonesia (<https://gis.bnpb.go.id/>), Sepanjang tahun 2024 khususnya di Sumatera Barat, telah terjadi 57 kejadian bencana di Sumatera Barat. Adapun rincian kejadian per jenis bencana dari Data Bencana Indonesia, yaitu 45 kejadian banjir, 8 kejadian tanah longsor, 1 kejadian cuaca ekstrem, 1 kejadian karhutla, dan 1 kejadian kekeringan. Berdasarkan data tersebut, bencana alam yang mendominasi adalah banjir dan tanah longsor. Bencana tersebut terjadi disebabkan cuaca ekstrem dan curah hujan yang tinggi di Sumatera Barat. Di sisi lain, aktivitas manusia yang mengeksploitasi alam dan merusak lingkungan, seperti membuang sampah sembarangan ke sungai, hutan, dan lain sebagainya juga dapat menimbulkan banjir dan tanah longsor. Dampak banjir dan tanah longsor ini sangat merugikan bagi manusia, diantaranya menimbulkan banyak korban jiwa, hilangnya harta benda, kerusakan tempat tinggal, dan banyak kerugian lainnya yang tentunya sangat merugikan manusia baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek.

Salah satu daerah di Sumatera Barat yang rawan terhadap potensi dan risiko bencana adalah Kota Bukittinggi. Kota tersebut rawan terhadap bencana disebabkan karena Kota Bukittinggi terletak pada kawasan yang dikenal dengan sebagai jalur utama Sesar Sumatera yaitu pada segmen Central Barisan Fault Zone

(CBFZ). Central Barisan Fault Zone (CBFZ) merupakan jalur utama Sesar Sumatera yang sering disebut dengan “Patahan Semangko” yang membentang di sepanjang daratan Pulau Sumatera. Karena Kota Bukittinggi dilalui jalur sesar aktif Sumatera, maka kota tersebut sangat rawan terhadap bencana dikarenakan wilayah ini merupakan episentrum gempa bumi di Pulau Sumatera. Kawasan Kota Bukittinggi memiliki permukaan yang berbukit dan dilalui Patahan Semangko yang mengakibatkan kota ini rentan terhadap bencana alam, khususnya gempa bumi, banjir, dan tanah longsor. Hal tersebut, memerlukan kebijakan yang tepat dari pemerintah dalam pembangunan tata kota dan perencanaan terhadap mitigasi bencana.

Wilayah Kota Bukittinggi terdiri dari tiga kecamatan, yaitu Kecamatan Mandiangin Koto Selayan (MKS), Kecamatan Guguk Panjang, dan Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh (ABTB). Berdasarkan data dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bukittinggi tahun 2024 yang bersumber dari dokumen Kajian Risiko Bencana Kota Bukittinggi 2019-2023 seluruh wilayah Kota Bukittinggi berpotensi tinggi terhadap bahaya banjir. Adapun besaran luas bahaya banjir masing-masing kecamatan di Kota Bukittinggi, yaitu Mandiangin Koto Selayan sebesar 607,77 Ha, Guguk Panjang sebesar 294,12 Ha, dan Aur Birugo Tigo Baleh sebesar 382,77 Ha. Berdasarkan data tersebut, secara keseluruhan total luas dampak bahaya banjir di Kota Bukittinggi adalah 1.284,66 Ha yang berada pada kategori tinggi.

Selain itu, kawasan Kota Bukittinggi yang meliputi tiga kecamatan, yaitu Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kecamatan Guguk Panjang, dan Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh juga merupakan kawasan yang rawan terhadap gempa bumi. Kemudian, untuk kawasan yang rawan terhadap tanah longsor berada di sepanjang bibir Ngarai Sianok. Hal tersebut ditunjukkan pada tabel di bawah ini,

Tabel 1.1
Wilayah Rawan Bencana Gempa Bumi dan Tanah Longsor

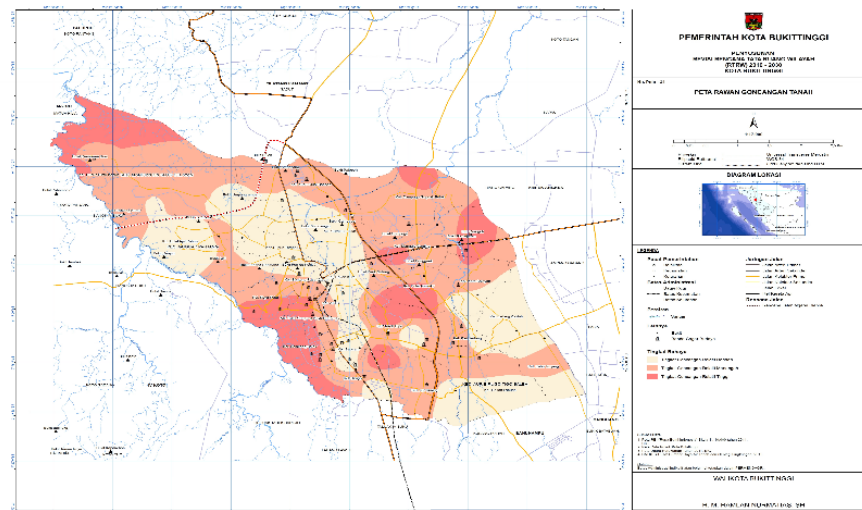
Rawan Gempa Bumi				
No	Zona	Kecamatan		
		ABTB	GP	MKS
1.	Zona rawan tinggi	Belakang Balok Birugo Ladang Cakiah Kubu Tanjung Pakan Labuah Sapiran Aur Kuning Parit Antang	Kayu Kubu Bukik Cangang Pakan Kurai ATTS Tarok Dipo Benteng Pasar Atas Bukit Apit Puhun	Koto Selayan Garegeh Campago G.Bulek Campago Ipuh Kubu Gulai Bancah Puhun Tembok Manggis Ganting Pulai Anak Air Puhun Pintu Kabun
Kerawanan Goncangan Tanah				
No	Zona	Kecamatan		
		ABTB	GP	MKS
1.	Zona rawan rendah	Kubu Tanjung Pakan Labuah Aur Kuning Sapiran Parit Antang Ladang Cakiah	Tarok Dipo ATTS Benteng Pasar Atas Pakan Kurai	Pulai Anak Air Koto Selayan Campago Ipuh Puhun Tembok Garegeh Manggis Ganting Campago G.Bulek
2.	Zona rawan tinggi	Birugo Belakang Balok	Bukik Cangang Bukit Apit Puhun Kayu Kubu	Puhun Pintu Kabun Kubu Gulai Bancah

Sumber : RKPD Kota Bukittinggi Tahun 2024

Berdasarkan tabel di atas, bahwa seluruh kawasan di Kota Bukittinggi memiliki risiko tinggi terhadap bencana alam seperti tanah longsor dan gempa bumi, yang dikategorikan mulai dari zona rawan rendah, zona rawan sedang, hingga zona rawan tinggi. Terkhusus Kelurahan Kayu Kubu yang menjadi lokasi penelitian terletak di zona rawan tinggi terhadap potensi bencana.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bukittinggi Tahun 2010-2030, dinyatakan bahwa sepanjang kawasan Ngarai Sianok dan wilayah di sekitarnya, termasuk dalam radius 50 meter dari bibir Ngarai, tergolong sebagai wilayah dengan risiko bencana

yang tinggi. Tepatnya di Kelurahan Kayu Kubu sangat rawan terhadap bencana dikarenakan wilayah tersebut terletak di dekat Ngarai Sianok. Untuk lebih jelasnya, mengenai kawasan rawan gempa bumi dan guncangan tanah di Kota Bukittinggi dapat dilihat dari peta kerawanan bencana di Kota Bukittinggi di bawah ini :



Gambar 1.1 Peta Rawan Bencana Kota Bukittinggi

Sumber : RTRW Kota Bukittinggi 2010-2030

Kelurahan Kayu Kubu merupakan kawasan desa wisata daerah yang rentan terhadap bencana. Bencana yang melanda kawasan tersebut biasanya, seperti banjir dan tanah longsor, yang umumnya terjadi akibat tingginya intensitas hujan. Secara historis, Kota Bukittinggi, tepatnya di Kelurahan Kayu Kubu pernah terjadi gempa yang sangat dahsyat pada tahun 2007 dan 2009 yang menimpa masyarakat. Namun, gempa bumi tahun 2007 yang menjadi luka mendalam bagi masyarakat Kayu Kubu karena pada saat itu salah satu RT hilang dan runtuh akibat dari guncangan gempa yang sangat dahsyat. Peristiwa tersebut menjadi teguran keras dan pembelajaran penting bagi masyarakat dan pemerintah agar selalu siap siaga dalam menghadapi bencana. Selain peristiwa besar tersebut, dari informasi yang didapatkan dari beberapa media, mulai dari media sosial, artikel berita, internet, dan lain sebagainya terdapat beberapa kejadian bencana yang terjadi di Kelurahan Kayu Kubu dan sekitarnya. Berikut disajikan tabel beberapa kejadian bencana :

Tabel 1.2
Rekam Jejak Kejadian Bencana di Kelurahan Kayu Kubu

Waktu Kejadian	Jenis bencana	Dampak	
		Manusia	Fisik
11 Desember 2021	Tanah longsor	Tidak ada korban jiwa	Aliran Sungai Batang Sianok tersumbat
17 November 2023	Tanah longsor	Tidak ada korban jiwa	Akses jalan di objek wisata panorama Nagarai Sianok terhambat
18 Desember 2023	Tanah longsor	Tidak ada korban jiwa	Akses jalan alternatif Bukittinggi-Agam ditutup karena material longsor
20 Januari 2024	Banjir	Tidak ada korban jiwa	Air sungai meluap. Tetapi, tidak sampai ke jalan
3 April 2024	Banjir	Tidak ada korban jiwa	1 rumah terendam banjir (tidak terlalu parah)
30 April 2024	Banjir Bandang	40 orang mengungsi (10 KK)	1. 8 unit rumah digenangi lumpur dan air 2. 1 unit warung tiangnya miring 3. Halaman musholla digenangi air dan lumpur
3 Juni 2024	Banjir Bandang	44 orang mengungsi	14 unit rumah digenangi lumpur dan pasir

Sumber : Data Informasi KBLK Kayu Kubu

Dari fenomena dan bencana yang telah terjadi, diperlukan aktivitas, strategi, dan upaya yang bertujuan untuk meminimalisir dampak yang ditimbulkan oleh bencana melalui mitigasi bencana. Mitigasi bencana adalah upaya yang dilakukan untuk mengurangi risiko bencana dengan menurunkan kerentanan dan/atau meningkatkan kemampuan serta kapasitas masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana. Upaya tersebut dilakukan dengan tujuan untuk mempersiapkan masyarakat dalam menghadapi bencana. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana menjelaskan bahwa serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana disebut dengan mitigasi bencana. Sedangkan penanggulangan bencana

menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi. Secara umum, upaya penanggulangan bencana meliputi pencegahan, pengurangan risiko bahaya, kesiapsiagaan masyarakat, tanggap darurat, pemulihan melalui rehabilitasi dan rekonstruksi, serta pembangunan berkelanjutan yang bertujuan untuk mengurangi risiko bencana. Dalam hal ini, peran aktif masyarakat juga menjadi suatu hal yang sangat penting dan tidak dapat diabaikan dalam upaya penanggulangan bencana.

Mitigasi bencana adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Tanggung jawab tersebut diupayakan dalam memberikan sosialisasi, edukasi, dan pemberdayaan kepada individu, keluarga, kelompok/komunitas, dan masyarakat terkait strategi adaptasi dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. Mitigasi bencana penting dilakukan oleh seluruh elemen yang ada dimasyarakat, baik di wilayah yang memiliki potensi ancaman bencana yang rendah maupun wilayah yang memiliki potensi ancaman bencana yang tinggi. Terkhusus untuk wilayah yang termasuk kategori tinggi terhadap bencana, mitigasi bencana menjadi hal yang sangat krusial dan sangat penting dilakukan. Mitigasi bencana merupakan modal utama untuk meminimalisir risiko bencana dan pembangunan kapasitas (*capacity building*) masyarakat yang tangguh terhadap bencana dikarenakan mitigasi bencana adalah sebuah keharusan yang penting dilakukan oleh seluruh elemen yang ada dimasyarakat, bukan hanya sekedar pilihan kebijakan. Mitigasi bencana perlu dilakukan secara terencana dan berkelanjutan agar masyarakat menjadi berdaya dan memiliki kemampuan dalam menghadapi bencana. Dengan demikian, pentingnya mitigasi bencana di daerah yang ancaman bencananya tinggi adalah karena mitigasi bencana merupakan modal dan investasi jangka panjang untuk membangun sistem dan kapasitas masyarakat yang berdaya untuk beradaptasi terhadap datangnya bencana.

Salah satu program yang dijalankan oleh pemerintah melalui Badan Penanggulangan Bencana Nasional adalah penanggulangan bencana berbasis

komunitas di suatu wilayah, yang dikenal sebagai Program Pengembangan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana (Destana). Pengembangan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana juga sejalan dengan Visi Badan Nasional Penanggulangan Bencana: "Ketangguhan bangsa dalam menghadapi bencana". Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana. Desa/Kelurahan Tangguh Bencana (Destana) adalah desa atau kelurahan yang mempunyai kemampuan dan kapasitas untuk menghadapi ancaman bencana, beradaptasi terhadap bencana, dan mampu memulihkan diri dari dampak bencana. Desa/Kelurahan yang telah melaksanakan program Destana telah diberikan pelatihan oleh BPBD setempat untuk mengenali ancaman dan risiko bencana di daerahnya sehingga mampu memberdayakan masyarakat untuk meminimalisir dampak dan risiko bencana serta meningkatkan kapasitas masyarakat dalam upaya mitigasi bencana. Penanganan bencana alam membutuhkan pendekatan yang terpadu dan menyeluruh, melibatkan berbagai pihak mulai dari pemerintah pusat hingga komunitas terkecil di tingkat desa/kelurahan. Hal ini sesuai dengan tujuan dan tanggung-jawab NKRI sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Upaya pengurangan risiko bencana berbasis komunitas yang dilaksanakan melalui pengembangan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana merupakan bagian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten/Kota. Pembentukan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana bertujuan untuk melindungi masyarakat dari ancaman bencana dengan menyelenggarakan kegiatan penanggulangan bencana yang berfokus pada komunitas dan masyarakat setempat, melalui pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang tersedia di lingkungan sekitar.

Berdasarkan data dari portal katalog kesiapsiagaan BNPB, terdapat 33 provinsi, 252 kabupaten/kota, 780 kecamatan, dan 1458 desa/kelurahan yang telah melaksanakan program penanggulangan bencana berbasis komunitas melalui program desa/kelurahan tangguh bencana yang tersebar di berbagai provinsi di Indonesia. Di Provinsi Sumatera Barat, terdapat 51 praktek penanggulangan bencana berbasis komunitas melalui desa/kelurahan tangguh bencana. Sementara

itu, Kota Bukittinggi juga telah melaksanakan program penanggulangan bencana melalui ketahanan bencana lingkungan kelurahan (KBLK) yang telah dilaksanakan di 24 kelurahan di Kota Bukittinggi.

Ketahanan bencana lingkungan kelurahan (KBLK) adalah sebuah komunitas atau sistem ketahanan bencana yang berada di lingkungan kelurahan yang meliputi unsur-unsur BPBD, pejabat Kelurahan, RT, RW, serta seluruh lapisan masyarakat yang berada di suatu kelurahan. Ketahanan bencana lingkungan kelurahan (KBLK) merupakan implementasi dari Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana. Oleh sebab itu, KBLK ini adalah salah satu wujud dari program penanggulangan bencana berbasis komunitas yaitu program Desa/Kelurahan Tangguh Bencana yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Program Ketahanan Bencana Lingkungan Kelurahan (KBLK) telah dibentuk sejak awal tahun 2012 di Kota Bukittinggi. KBLK memiliki peran penting dalam kesiapsiagaan terhadap bencana. Mengingat Kota Bukittinggi terletak di lintasan Sesar Sumatera yang bernama patahan semangka di bagian Ngarai Sianok yang sangat rawan terhadap bencana. Pendirian KBLK mendapatkan respon yang positif dari masyarakat dan pemerintah daerah. KBLK juga berperan penting dalam upaya mitigasi dan penanggulangan bencana serta berperan aktif dalam penanganan dini kepada masyarakat terhadap bencana yang tidak dapat diprediksi kapan akan terjadi. Pembentukan KBLK ini diharapkan mampu mengenali risiko, ancaman, dan potensi bencana secara dini sehingga masyarakat mampu melakukan pencegahan dan merespon risiko-risiko yang dapat mengancam. KBLK merupakan suatu cara masyarakat untuk bertahan menghadapi segala potensi ancaman bencana dengan cara pembangunan kapasitas (*capacity building*), menyusun rencana penanggulangan bencana tingkat kelurahan/desa, membuat prosedur darurat, dan lain sebagainya serta melibatkan relawan di kelurahan, dan melibatkan kaum perempuan dari unsur kader PKK dan kader posyandu dalam upaya yang terencana, terorganisir, dan komprehensif. (Jaswit, 2017).

KBLK merupakan lembaga swadaya masyarakat yg terdiri atas unsur LPM, Nagari, RW/RT tokoh masyarakat dan pemuda ini secara teknis dibina dan di fasilitasi oleh Lurah dan BPBD Kota Bukittinggi. Pada tahun 2022 pemerintah Kota Bukittinggi melakukan pembinaan edukasi/pelatihan bagi KBLK di 24 Kelurahan serta fasilitasi sarana penanggulangan bencana seperti pakaian dan atribut, tenda beserta veldbed, peralatan PPPK beserta tandu serta perangkat radio komunikasi. Untuk Kelurahan Kayu Kubu di berikan secara khusus penyusunan kajian resiko bencana dan penyusunan rencana aksi pengurangan resiko bencana yang mana hal ini mendukung proses Geopark Sianok-Maninjau menuju UNESCO.

Salah satu kelurahan yang aktif melaksanakan program desa/kelurahan tangguh bencana melalui Ketahanan Bencana Lingkungan Kelurahan (KBLK) di Kota Bukittinggi adalah Kelurahan Kayu Kubu. Selain aktif melakukan kegiatan di lapangan dalam penanggulangan bencana, KBLK Kayu Kubu juga aktif di social media untuk memberikan edukasi dan sosialisasi berupa informasi, postingan, dan konten mengenai kebencanaan. Kemudian, KBLK Kayu Kubu juga aktif melakukan kegiatan sosial tidak hanya di Kelurahan Kayu Kubu. Akan tetapi, KBLK Kayu Kubu juga selalu ikut melakukan aksi kemanusiaan ke daerah-daerah yang terdampak bencana hingga ikut melakukan pengamanan lalu lintas pada masa hari liburan lebaran dan akhir tahun. Dikarenakan aktifnya KBLK Kayu Kubu dalam menjalankan aktivitas dan kegiatan penanggulangan bencana dan kegiatan sosial lainnya, hal tersebut membuat KBLK Kayu Kubu menjadi tempat studi tiru oleh Satgas dan KSB di daerah lain. Sampai saat ini sudah ada 2 Nagari, yaitu Nagari Rambatan dan Nagari Padang Magek dari Kabupaten Tanah Datar yang melakukan studi tiru dan latihan bersama KBLK Kayu Kubu. Ketahanan Bencana Lingkungan Kelurahan (KBLK) Kayu kubu adalah implementasi dari perwujudan kesiapsiagaan bencana alam yang ada di lingkungan kelurahan kayu kubu dimana letak geografi dan topografi daerah yang terletak diatas patahan semangko sumatera tepatnya di segmen sianok. Selanjutnya KBLK Kayu Kubu memiliki keunikan dari KBLK Kelurahan lainnya, yaitu salah satu peran KBLK Kayu Kubu adalah untuk mengenalkan alam kayu kubu untuk geopark nasional dan dunia yang akan tercatat di UNESCO. Kelurahan Kayu Kubu juga merupakan desa wisata, tetapi daerahnya

rentan terhadap bencana. Bencana yang melanda kawasan tersebut biasanya, seperti banjir dan tanah longsor, yang umumnya terjadi akibat cuaca ekstrem dan tingginya intensitas hujan. Ketahanan Bencana Lingkungan Kelurahan (KBLK) Kayu Kubu merupakan bentuk implementasi mitigasi dan kesiapsiagaan terhadap bencana alam di lingkungan Kelurahan Kayu Kubu yang diamanatkan dari Peraturan Kepala BNPB Nomor 1 Tahun 2012. Wilayah ini terletak di atas patahan Semangka Sumatera, khususnya di dekat Ngarai Sianok, sehingga rentan terhadap bencana. Atas inisiatif BPBD Kota Bukittinggi, KBLK Kayu Kubu dibentuk sebagai langkah mitigasi dan upaya melindungi masyarakat dari risiko bencana sebagai respon terhadap gempa yang terjadi pada tahun 2007 untuk upaya peningkatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai mitigasi dan penanggulangan bencana dalam rangka penguatan kapasitas masyarakat untuk mengurangi kerentanan masyarakat terhadap bencana. Terlebih lagi, pada saat ini dengan beredarnya isu mengenai potensi "*Megathrust*" yang bisa terjadi kapan saja, kesiapsiagaan menjadi sangat penting. Jika masyarakat tidak memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai untuk menghadapi bencana, dampak kerusakan serta jumlah korban jiwa yang ditimbulkan akan semakin besar ketika bencana terjadi.

1.2. Rumusan Masalah

Penanggulangan dan pengurangan risiko bencana sangat penting dilakukan melalui upaya mitigasi bencana yang diterapkan dimulai dari diri sendiri, lingkungan keluarga, hingga di lingkungan masyarakat. Kita tidak mengetahui kapan dan dimana bencana akan terjadi. Untuk itu, dibutuhkan aktor-aktor yang memiliki peran dalam upaya untuk memberikan edukasi dan pengetahuan kepada masyarakat mengenai kebencanaan mulai dari mitigasi bencana, tanggap darurat, hingga pemulihan kembali setelah bencana. hal tersebut ditandai dengan adanya Ketahanan Bencana Lingkungan Kelurahan (KBLK). Ketahanan Bencana Lingkungan Kelurahan (KBLK) merupakan kesatuan sistem yang ada dalam masyarakat di lingkungan kelurahan yang terdiri dari kumpulan individu yang memiliki peran dan bertanggung jawab dalam penanggulangan dan pengurangan risiko bencana. Hal tersebut tentunya tidak mudah dan tidak akan berjalan dengan

sendirinya tanpa adanya dukungan dan partisipasi masyarakat dalam upaya pengurangan risiko bencana berbasis masyarakat melalui upaya mitigasi bencana. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas melalui penelitian yang akan dilakukan dan kajian terhadap berbagai pemikiran dan tulisan tentang kebencanaan, maka rumusan masalah penelitian yang ingin dipecahkan, yaitu :

“Bagaimana upaya Ketahanan Bencana Lingkungan Kelurahan (KBLK) dalam mengedukasi masyarakat tentang penguatan mitigasi bencana dan peningkatan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana di lingkungan kelurahan ?”

1.3. Tujuan Penelitian

1.3.1. Tujuan Umum

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan mengidentifikasi upaya yang dilakukan oleh Ketahanan Bencana Lingkungan Kelurahan (KBLK) dalam mengedukasi masyarakat mengenai mitigasi bencana sebagai bentuk penyelenggaraan penanggulangan bencana dan pengurangan risiko bencana di lingkungan kelurahan.

1.3.2. Tujuan Khusus

Untuk mencapai tujuan umum, maka disusun tujuan khusus dari penelitian ini, yaitu :

- a. Mendeskripsikan bentuk-bentuk tindakan KBLK Kayu Kubu dalam mengedukasi masyarakat tentang mitigasi bencana
- b. Mengidentifikasi upaya KBLK Kayu Kubu dalam meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terkait mitigasi bencana.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Akademis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian ilmiah di bidang sosiologi kebencanaan, khususnya mengenai aktivitas komunitas lokal dalam pengurangan risiko bencana.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan baru dan kajian dari perspektif sosiologis tentang kebencanaan
- c. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan bagi peneliti selanjutnya yang berhubungan dengan studi kebencanaan dari perspektif sosiologis

1.4.2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini dapat memberikan rekomendasi yang bermanfaat bagi KBLK dan komunitas lainnya serta masyarakat dalam meningkatkan kapasitas kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana.
- b. Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan bagi pemerintah daerah dan lembaga terkait, seperti BPBD dan Kementerian Sosial, dalam merancang program yang lebih efisien untuk pengurangan risiko bencana.
- c. Penelitian ini dapat mendorong kolaborasi yang lebih kuat antara pemerintah, komunitas, dan sektor swasta dalam hal mitigasi bencana, dengan memberikan rekomendasi untuk memperkuat sinergi di antara berbagai pemangku kepentingan.

1.5. Tinjauan Pustaka

1.5.1. Ketahanan Bencana Lingkungan Kelurahan (KBLK)

Ketahanan Bencana Lingkungan Kelurahan yang selanjutnya disingkat KBLK adalah kesatuan tindakan masyarakat yang dibentuk untuk menyelenggarakan penanggulangan bencana di lingkungan kelurahan. Selain itu, Ketahanan Bencana Lingkungan Kelurahan (KBLK) merupakan suatu sistem pengelolaan sumber daya lingkungan dalam rangka mewujudkan keselamatan dan keamanan lingkungan dari bencana. Untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan bencana dimulai dari tingkat yang terkecil di suatu daerah, yaitu lingkungan kelurahan. Dengan demikian, sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi No. 2 Tahun 2015 Pasal 33 ayat 1 dibentuk kelompok relawan di tingkat Kelurahan yang disebut Ketahanan Bencana Lingkungan Kelurahan (KBLK) (Perda No 2 Tahun 2015).

KBLK adalah kelompok atau suatu sistem ketahanan bencana yang berada di lingkungan kelurahan/desa. KBLK Kelurahan Kayu Kubu dibentuk Oleh BPBD

Kota Bukittinggi berdasarkan program destana (Desa/Kelurahan Tangguh Bencana) dengan kemampuan kesiapsiagaan bencana yang baik sebelum, saat terjadi, dan sesudah terjadinya bencana di lingkungan kelurahan. KBLK Kelurahan Kayu Kubu didirikan pada tahun 2012 yang dikomandoi oleh BPBD Kota Bukittinggi. Pelaksanaan kegiatan KBLK Kelurahan Kayu Kubu berkoordinasi dengan BPBD, Dandim, Polres dan masyarakat Kelurahan Kayu Kubu. KBLK memiliki tujuan untuk mempersiapkan diri dan masyarakat dari ancaman, risiko, dan potensi bencana dengan cara bersahabat dengan alam dan tetap melibatkan partisipasi masyarakat, memantau/mengawasi, serta mendorong Gerakan dan kampanye kelurahan terkait dengan potensi bencana, mitigasi bencana, dan penanggulangan bencana (Sari, 2020).

Pengurus KBLK terdiri dari 30 orang anggota dengan masa bakti selama 5 tahun. Adapun susunan pengurus KBLK yang terdiri dari pembina teknis langsung dari BPBD Kota Bukittinggi, pembina umum langsung dari lurah setempat. Di dalam struktur kepengurusan KBLK terdiri dari ketua, sekretaris, kepala bidang, komandan regu, dan anggota. Terdapat 4 bidang dalam KBLK Kayu Kubu, yaitu :

1. Bidang Pelayanan Kesehatan

Bidang pelayanan kesehatan berwenang untuk memberikan pelayanan kesehatan pada saat tanggap darurat sesuai kompetensinya dilengkapi dengan peralatan medis dan obat-obatan. Selanjutnya, bidang ini bertanggung jawab memberikan layanan dan fasilitas kesehatan terhadap korban bencana ditingkat kelurahan.

2. Bidang Operasi

Bidang operasi berwenang mengatur atau menyelenggarakan tindakan penanggulangan serta operasional tanggap darurat di kelurahan. Kemudian, bidang operasi dalam hal ini bertanggung jawab menyelenggarakan tindakan penanggulangan awal pada kejadian bencana (evakuasi, dapur umum, tim reaksi cepat, SAR) ditingkat kelurahan, memberikan dukungan bersama regu-regu dibawahnya serta berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bukittinggi.

3. Bidang Keuangan

Bidang keuangan bertanggung jawab menghimpun dana, mengelola dan mengatur keuangan dalam KBLK.

4. Bidang Logistik

Bidang logistik bertanggung jawab memfasilitasi dan menyiapkan keperluan peralatan terkait penanggulangan bencana.

Selain itu, di bawah bidang operasi terdapat 4 regu, yaitu :

1. Regu Kaji Cepat

Kelompok orang yang diberi wewenang untuk melakukan kajian cepat terhadap dampak kejadian bencana, jenis kerusakan atau kerugian dan rencana kebutuhan darurat serta memerlukan upaya penanggulangan dini, melaporkan hasil kegiatan bidang operasi atau ketua ketahanan bencana lingkungan kelurahan.

2. Regu SAR / Evakuasi

Kelompok orang yang diberi wewenang untuk menyelenggarakan kegiatan SAR (cari dan selamatkan) dan tindakan evakuasi (usaha untuk meminimalisir risiko kerugian dengan memindahkan korban beserta harta benda dari ancaman bencana ke tempat aman). Selanjutnya, bertanggung jawab memelihara keterampilan, peralatan, serta sarana dan prasarana penunjang kegiatan SAR dan evakuasi dan melaporkannya kepada bidang operasi atau ketua ketahanan bencana lingkungan kelurahan.

3. Regu PPPK

Kelompok orang yang diberi wewenang untuk menyelenggarakan pertolongan pertama pada korban bencana setelah tindakan SAR dan evakuasi di tempat berhimpun sementara atau tempat pengungsian. Kemudian, bertanggung jawab terhadap tindakan pertolongan pertama, peralatan PPPK serta obat-obatan yang digunakan kepada korban bencana. Selanjutnya melaporkan hasil kegiatan kepada bidang operasi atau ketua ketahanan bencana lingkungan kelurahan.

4. Regu Dapur Umum Lapangan (Dumlap)

Kelompok orang yang diberi wewenang mendirikan tempat atau tenda dapur umum lapangan pada masa tanggap darurat bencana. Selanjutnya, bertanggung jawab mendirikan dan menjaga ketersediaan dan menginventarisir kebutuhan logistik untuk dapur umum lapangan pada tempat berhimpun atau tempat pengungsian serta melaporkan hasil kegiatan kepada bidang operasi atau ketua ketahanan bencana lingkungan kelurahan.

Peran KBLK dalam pengurangan risiko bencana berbasis komunitas antara lain: Pertama, Menyusun dan merancang segala bentuk kegiatan penanggulangan bencana mulai dari peringatan dini, pencegahan, hingga penanggulangan bencana. Kedua, Menyusun rencana penanggulangan bencana dan melakukan kajian terkait ancaman, risiko, serta potensi bencana bersama pemangku kepentingan dan beberapa tokoh masyarakat melalui forum musyawarah bersama. Ketiga, bekerja sama dengan pemerintah daerah dan BPBD untuk mengadakan pelatihan dan simulasi terkait dengan kebencanaan kepada masyarakat dalam rangka pengurangan risiko bencana. Keempat, memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang kebencanaan kepada masyarakat terkait pentingnya mitigasi dan penanggulangan bencana serta berpartisipasi aktif dalam kegiatan penyelenggaraan penanggulangan dan tanggap darurat bencana di lingkungan kelurahan maupun daerah.

1.5.2. Mitigasi Bencana

Bencana bisa terjadi kapan pun dan dimana pun tanpa bisa kita prediksi. Untuk itu, salah satu langkah serta upaya kita untuk menanggulangi bencana adalah dengan meminimalisir risiko dan dampak dari bencana itu sendiri melalui mitigasi bencana. Mitigasi bencana adalah suatu usaha dan upaya yang dilakukan untuk menekan dan mengurangi risiko dan dampak bencana dengan tujuan mengendalikan atau meminimalisir kerusakan dan kekacauan yang ditimbulkan akibat bencana, sehingga jumlah korban, kerusakan, dan kerugian dapat dikurangi (Salahuddin, 2019). Senada dengan itu, (Lassa; et al., 2022) mendefinisikan mitigasi bencana sebagai serangkaian usaha dan upaya untuk mengurangi dan

menurunkan risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun peningkatan kapasitas (*capacity building*) dan peningkatan kesadaran serta kemampuan dalam menghadapi bencana. Sedangkan, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, mitigasi merupakan serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Kegiatan mitigasi bencana dapat dilakukan melalui :

1. Pelaksanaan penataan tata ruang
2. Pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur, tata bangunan
3. Penyelenggaraan pendidikan, penyuluhan, dan pelatihan baik secara konvensional maupun modern

Mitigasi bencana terbagi menjadi dua yaitu mitigasi struktural dan mitigasi non struktural (Susilo, 2022).

1. Mitigasi struktural adalah usaha yang dilakukan untuk mengurangi kerentanan (*vulnerability*) terhadap bencana melalui penerapan teknis dan rekayasa teknis, seperti :
 - a. Pembangunan infrastruktur bangunan tahan bencana
 - b. Pelebaran daerah aliran sungai, dan tindakan teknis lainnya
2. Mitigasi non struktural adalah upaya yang dilakukan untuk mengurangi dampak bencana yang tidak melibatkan upaya teknis seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Mitigasi non struktural disebut juga dengan mitigasi kultural. Mitigasi kultural dilakukan dengan pemberdayaan kepada masyarakat dengan cara memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang kebencanaan dan meningkatkan kesadaran sosial masyarakat yang tinggal di wilayah rawan bencana secara berkelanjutan tentang ancaman dan risiko bencana. Selain itu, mitigasi non struktural dilakukan dengan penguatan ketahanan dan ketangguhan sosial dengan cara :
 - a. Mengorganisir kelembagaan kelompok-kelompok yang terlibat
 - b. Membentuk lembaga atau komunitas untuk mitigasi bencana

- c. Menjaga keberlanjutan kelompok dengan memperhatikan kondisi kelompok formal dan informal
- d. Mempersiapkan kesiapsiagaan seluruh elemen yang ada di masyarakat

1.5.3. Ancaman (*Hazard*)

Dalam UU No. 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana dijelaskan bahwa ancaman bencana adalah suatu kejadian atau peristiwa yang bisa menimbulkan bencana. Istilah ancaman dalam konsep kebencanaan disebut juga dengan bahaya (*hazard*). Bahaya adalah proses atau fenomena yang terjadi secara alami atau secara buatan yang disebabkan oleh manusia yang berpotensi menimbulkan dan mengakibatkan kerugian, seperti kehilangan nyawa atau dampak kesehatan lainnya, kerusakan bangunan dan benda, gangguan sosial-ekonomi, serta degradasi lingkungan (Proag, 2014). Bahaya berpotensi menimbulkan bencana, tetapi tidak semua bahaya selalu menjadi bencana. Berdasarkan asalnya bahaya berasal dari :

1. Bahaya alam merupakan bahaya yang sebagian besar berasal dari proses atau peristiwa alam. Contohnya : letusan gunung berapi, tsunami, badai tropis, serta bahaya biologis (bakteri, virus, parasit, dan lain sebagainya).
2. Bahaya antropogenik merupakan bahaya yang berasal dan disebabkan oleh aktivitas manusia. Contoh bahaya antropogenik, yaitu :
3. Bahaya sosiologis, seperti konflik sosial, perang, terorisme, kejahatan, dan lain-lain.
4. Bahaya teknologi, seperti radiasi nuklir, polusi udara, limbah industry, dan lain-lain.
5. Bahaya lingkungan, seperti penebangan hutan secara liar, pencemaran air, eksploitasi alam, dan lain-lain
6. Bahaya sosio-alami merupakan bahaya yang berasal dan disebabkan oleh kombinasi faktor alam dan antropogenik. Contohnya : banjir dan tanah longsor yang disebabkan oleh curah hujan yang tinggi dan penebangan hutan secara liar.

1.5.4. Kerentanan (*Vulnerability*)

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kerentanan dikatakan sebagai kondisi tertentu yang dapat menyebabkan penurunan daya kemampuan individu atau kelompok. Dalam konteks kebencanaan kerentanan merupakan kondisi dari individu atau kelompok yang membuat dan atau menyebabkan ketidakmampuan dalam menghadapi bencana. Selain itu, kerentanan adalah suatu kondisi dan keadaan yang berpengaruh buruk terhadap upaya pencegahan dan penanggulangan bencana. kerentanan dapat mempengaruhi kemampuan inidividu atau kelompok dalam menghadapi bencana atau ancaman bencana.

Dalam Peraturan Kepala BNPB No. 1 Tahun 2012 tentang pedoman umum desa/kelurahan tangguh bencana dijelaskan bahwa kerentanan adalah kondisi atau karakteristik biologis, geografis, hukum, ekonomi, politik, budaya, dan teknologi suatu masyarakat di suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan masyarakat tersebut untuk mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan menanggapi dampak ancaman atau bahaya tertentu.

Jadi secara sederhana, kerentanan adalah suatu kondisi atau keadaan dari individu, kelompok, atau masyarakat yang menyebabkan ketidakmampuan dalam menghadapi ancaman bahaya bencana. Kerentanan dapat dikurangi dengan meningkatkan kapasitas dan ketahanan sosial masyarakat. Ketika ketahanan sosial masyarakat di suatu wilayah tinggi, maka kerentanan terhadap bencana menjadi rendah, ancaman bencana pun rendah, serta risiko bencana dapat dikurangi.

1.5.5. Kelompok Rentan

Kelompok rentan adalah kelompok masyarakat yang memiliki keterbatasan dan berisiko tinggi terhadap bencana yang perlu memperoleh penanganan dan perhatian khusus. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 pasal 55 ayat 2 menyatakan bahwa kelompok rentan yang dimaksud adalah :

1. Bayi,
2. Balita,
3. Anak-anak,

4. Ibu yang sedang mengandung atau menyusui,
5. Penyandang cacat,
6. Orang lanjut usia (lansia).

Perlindungan dan penanganan terhadap kelompok rentan dapat dilakukan dengan memberikan prioritas dan perhatian khusus kepada mereka, berupa evakuasi, penyelamatan, pelayanan kesehatan, dan psikososial. Dalam konteks mitigasi bencana, upaya pengurangan risiko bencana terhadap kelompok rentan ini akan lebih efektif dilakukan dengan kegiatan yang partisipatif, seperti melibatkan mereka dalam kegiatan sosialisasi dan edukasi tentang mitigasi bencana, pelatihan kesiapsiagaan bencana, pelatihan P3K, dan lain sebagainya. Dengan keterlibatan kelompok rentan dalam upaya pengurangan risiko bencana, pihak terkait seperti pemerintah, BPBD, Kelurahan, KBLK, dan tokoh masyarakat dapat mengetahui keadaan dan kebutuhan mereka secara terukur dan mendalam sehingga dapat meminimalisir dampak bencana terhadap kelompok rentan.

1.5.6. Kapasitas (*Capacity*)

Kapasitas (*capacity*) adalah kemampuan atau keahlian individu, komunitas, kelompok masyarakat, dan institusi/lembaga dalam memanfaatkan sumber daya untuk menanggulangi dan mengurangi risiko bencana. Selain itu, kapasitas merupakan kekuatan dan keterampilan yang dimiliki individu atau kelompok masyarakat untuk mengenali potensi dan risiko bencana. kekuatan dan keterampilan tersebut memungkinkan individu atau kelompok untuk siap siaga, mencegah, menanggulangi, serta dapat dengan cepat pulih kembali dari dampak yang ditimbulkan akibat bencana. Kapasitas yang baik memerlukan kesadaran dari dalam individu atau kelompok, sumber daya yang didukung pengelolaan yang baik di waktu sebelum terjadi bencana, saat terjadi bencana, dan setelah terjadi bencana. Kapasitas mencakup berbagai aspek teknis dan non teknis, seperti sarana dan prasarana, struktur bangunan, serta kelembagaan atau institusi sosial dan ekonomi. Selain itu, kapasitas juga meliputi pengetahuan individu atau kelompok terhadap potensi dan risiko bencana, kemampuan adaptasi sosial, keterampilan saat saat sebelum terjadi bencana, tanggap darurat, serta pasca bencana. Kemudian relasi

sosial, modal sosial, jaringan sosial antar individu dan kelompok masyarakat. Lalu, kemampuan leadership dan managerial individu atau kelompok dalam mengorganisasi dan mengelola masyarakat dalam situasi dan kondisi darurat atau bencana.

Salah satu tujuan dari pengelolaan bencana berbasis komunitas melalui Ketahanan Bencana Lingkungan Kelurahan (KBLK) adalah *capacity building* atau pembangunan dan peningkatan kapasitas masyarakat untuk mewujudkan masyarakat yang tangguh dalam bencana. Masyarakat tangguh bencana merupakan masyarakat yang memiliki suatu kesadaran yang sudah terinternalisasi dalam sebuah komunitas sehingga menghasilkan kesiapsiagaan dan kapasitas yang tinggi dalam menghadapi bencana (Ma'arif & Hizbaron, 2015). *Capacity building* memiliki peranan penting dalam upaya pengurangan risiko bencana. Dalam konteks mitigasi, peningkatan kapasitas masyarakat adalah salah satu serangkaian tindakan atau cara yang dilakukan untuk menghadapi ancaman bencana yang ditujukan untuk mencegah dan meminimalisir risiko dan dampak bencana terhadap masyarakat. Peningkatan kapasitas tersebut dilakukan melalui sosialisasi, edukasi, dan partisipasi, berupa pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan untuk pembangunan dan pengembangan sumber daya manusia dan masyarakat mitigasi, kesiapsiagaan, adaptasi sosial, dan tanggap darurat dengan melakukan pendekatan yang partisipatif dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat secara berkelanjutan serta menanamkan prinsip gotong-royong dalam bermasyarakat. Fokus dari edukasi tersebut adalah pembangunan kapasitas masyarakat untuk mengurus diri mereka sendiri secara mandiri dan memiliki kemampuan terkait penanganan bencana, seperti mitigasi, kesiapsiagaan, dan tanggap darurat. Selain itu, masyarakat juga memiliki pengetahuan dalam mengenali potensi dan risiko bencana.

1.5.7. Edukasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), edukasi disebut dengan pendidikan. Pendidikan menurut KBBI adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui

upaya pengajaran dan pelatihan; proses, cara, perbuatan mendidik. Selanjutnya, Ki Hajar Dewantara mengemukakan bahwa pendidikan merupakan upaya untuk menjadikan seseorang memiliki budi pekerti, wawasan luas dan tanggap terhadap budaya guna melestarikan dan memajukan kebudayaan serta mencapai kebahagiaan sebagai kodrat manusia. Pendidikan selalu berkaitan erat dengan pengajaran. Menurut Ki Hadjar Dewantara, pengajaran adalah salah satu unsur dari pendidikan. Pengajaran sendiri merupakan proses dalam pendidikan yang bertujuan menyampaikan pengetahuan baik secara fisik maupun spiritual.

Sedangkan, pemikiran Emile Durkheim mengenai pendidikan adalah sebuah upaya yang dilakukan sebagai sarana untuk menanamkan nilai-nilai moral, norma-norma sosial, dan pengetahuan yang diperlukan untuk menjaga stabilitas dan kesinambungan masyarakat. Durkheim menekankan bahwa pendidikan tidak sekadar menyampaikan pengetahuan akademis. Lebih jauh, pendidikan memiliki peran penting dalam menanamkan nilai-nilai moral yang menjadi pondasi bagi terciptanya keharmonisan sosial. Moralitas dipandang sebagai elemen krusial untuk menjaga kestabilan dan keberlangsungan suatu masyarakat. Pendidikan moral dalam pandangan Durkheim berfungsi sebagai media untuk menanamkan kesadaran akan pentingnya kewajiban, tanggung jawab, serta solidaritas dalam kehidupan bermasyarakat. Ia percaya bahwa pendidikan moral berperan dalam membentuk individu yang lebih memahami peran dan tanggung jawabnya dalam lingkungan sosial.

Berdasarkan beberapa definisi yang telah disampaikan diatas menunjukkan bahwa edukasi atau pendidikan adalah proses penyampaian ilmu pengetahuan kepada individu atau kelompok melalui pengajaran dan penanaman nilai-nilai, norma-norma sosial, dan pengetahuan dengan tujuan untuk membentuk individu dalam memahami status, peran dan tanggung jawabnya dalam masyarakat. Dalam konteks kebencanaan, khususnya mitigasi bencana edukasi atau pendidikan pada hakikatnya adalah suatu kegiatan atau usaha dalam menyampaikan pesan dan pengetahuan kepada individu atau kelompok masyarakat mengenai bencana dan

upaya dalam penanggulangannya sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma sosial yang ada dalam masyarakat untuk mengurangi risiko dari ancaman bencana.

1.5.8. Tinjauan Sosiologis

Penelitian mengenai Ketahanan Bencana Lingkungan Kelurahan (KBLK) ini merupakan penelitian yang dikaji dan ditinjau dari perspektif sosiologi, khususnya sosiologi kebencanaan. Sosiologi kebencanaan sebagai salah satu cabang dan disiplin ilmu sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari dan mengkaji fenomena sosial yang berkaitan dengan bencana. (Ma'arif, 2015) menyatakan bahwa sosiologi kebencanaan memiliki peran penting dalam mengemban misi ketika masalah bencana dikaitkan dengan aspek sosial masyarakat, baik kerentanan maupun kapasitas dalam menghadapi ancaman bencana. Dalam perspektif sosiologi kebencanaan sebuah fenomena dan peristiwa yang disebut sebagai bencana ketika menimbulkan dampak bagi manusia. Secara empiris dapat dilihat bahwa, tidak semua gempa bumi, angin puting beliung, erupsi gunung berapi, banjir dan lain sebagainya adalah bencana. Jadi, selama kota tetap tangguh, kokoh, dan mampu menahan goncangan gempa, selama tanggul tidak jebol dan mampu menahan air, dan selama kapal-kapal mampu menerjang ombak dan menembus badai, maka peristiwa apapun belum dapat dikategorikan sebagai bencana.

(Ma'arif, 2010) menyatakan bahwa dari perspektif sosiologi, fokus terhadap bencana mengarah kepada bagaimana secara empiris melihat proses dan kegiatan yang dapat menimbulkan bencana, tatanan struktur sosial terhadap bencana, kerentanan sosial, tindakan sosial dalam penanggulangan bencana, sistem kepercayaan atau agama, dan kearifan lokal (*local wisdom*) terhadap terjadinya bencana. Hal itu disebabkan karena bukan hanya secara alamiah, tetapi dari manusia dan menuju manusialah bencana beroperasi. Dalam konteks penelitian ini, diperlukan pengurangan risiko bencana berbasis komunitas dalam upaya mitigasi bencana melalui Ketahanan Bencana Lingkungan Kelurahan (KBLK) sebagai aktor dalam melakukan tindakan sosial berupa sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat.

Untuk mencapai tujuan dalam penelitian ini, digunakan teori strukturasi yang dikembangkan oleh Anthony Giddens. Dalam teori ini, Giddens menyarankan untuk memahami hubungan antara tindakan individu (pelaku) dengan struktur secara bersamaan atau dualitas. Kedua elemen tersebut tidak dapat dipisahkan karena merupakan dua sisi dari koin yang sama. Giddens menjelaskan bahwa setiap studi dalam ilmu sosial selalu berkaitan dengan hubungan antara tindakan (yang sering kali dikaitkan dengan agen) dan struktur (Ritzer & Douglas, 2004: 507).

Dualitas (hubungan timbal balik) antara agen dan struktur terjadi dalam praktik sosial yang berulang dan memiliki pola di berbagai ruang dan waktu. Dualitas ini mengacu pada kenyataan bahwa "struktur menyerupai pedoman" yang menjadi dasar dari tindakan-tindakan yang terus diulang dalam kehidupan sosial. Namun demikian, pedoman tersebut juga berfungsi sebagai media (medium) yang memungkinkan praktik sosial terjadi.

Giddens menyebut skema tersebut sebagai struktur. Struktur ini bersifat universal, baik di Jakarta maupun di Medan, dari tahun 1992 hingga 1997. Struktur mampu melampaui batas waktu dan ruang (timeless dan spaceless) serta memiliki sifat maya (virtual), sehingga dapat diterapkan dalam berbagai konteks. Tidak seperti pandangan Durkheim yang melihat struktur sebagai sesuatu yang mengekang, Giddens memandang struktur sebagai hal yang memberdayakan dan memungkinkan terjadinya praktik sosial. Oleh karena itu, struktur menurut Giddens berfungsi sebagai sarana (medium) dan sumber daya (Priyono, 2016).

Menurut Giddens dalam (Priyono, 2016), terdapat tiga aspek internal dalam diri pelaku. Pertama adalah motivasi tidak sadar (*unconscious motives*), yang berkaitan dengan keinginan atau kebutuhan yang mungkin memengaruhi tindakan, namun bukan tindakan itu sendiri. Kedua, kesadaran diskursif (*discursive consciousness*), yang mencerminkan kemampuan seseorang untuk merefleksikan serta menjelaskan tindakan secara eksplisit. Ketiga, kesadaran praktis (*practical consciousness*), yang merujuk pada pengetahuan praktis yang tidak selalu dapat diungkapkan secara verbal. Kesadaran praktis ini sangat penting dalam memahami bagaimana tindakan dan praktik sosial berkembang menjadi struktur serta

bagaimana struktur tersebut sekaligus membatasi dan memungkinkan tindakan sosial.

Teori strukturalisasi menolak pemisahan antara teori interaksionisme simbolik dan fungsionalisme struktural. Giddens berpendapat bahwa kita harus memulai dari praktik sosial yang terus berulang, yakni interaksi yang menghubungkan agen dan struktur. Menurut Bernstein (Ritzer dan Douglas, 2004: 508), inti dari teori strukturalisasi adalah untuk menjelaskan hubungan timbal balik dan saling pengaruh antara agen dan struktur. Agen adalah mereka yang memberi dan menerima bantuan, sementara struktur mencakup norma, nilai, serta aturan seperti yang berasal dari perangkat adat.

Agen merujuk pada individu yang melakukan tindakan. Individu dapat bertindak berbeda di setiap tahapan tindakan. Tindakan tidak akan terjadi tanpa peran individu. Tindakan adalah proses berkelanjutan yang melibatkan kemampuan untuk introspeksi dan kesadaran diri, yang penting dalam mengendalikan tubuh dan kehidupan sosial sehari-hari (Giddens, 2010: 14). Dengan demikian, struktur tidak bisa sepenuhnya membatasi agen, karena agen dapat menciptakan perbedaan dan perubahan dalam masyarakat. Tanpa kekuasaan, agen tidak memiliki arti penting. Dengan adanya kekuasaan, agen memiliki kemampuan untuk bertindak dan memahami struktur.

Dalam kaitannya dengan penelitian ini, Ketahanan Bencana Lingkungan Kelurahan (KBLK) Kayu Kubu sebagai agen sosial bertindak atas dasar kehendaknya, namun tetap berada dalam batasan struktur sosial Kelurahan Kayu Kubu, seperti nilai-nilai budaya dan adat. Begitu juga dengan masyarakat di Kelurahan Kayu Kubu sebagai subjek dari edukasi mitigasi bencana, penerima manfaat, dan bagian dari struktur sosial. Masyarakat juga bisa menjadi agen melalui tindakan mereka dalam menyebarkan informasi atau menciptakan budaya sadar bencana di lingkungan mereka.

1.5.9. Penelitian Relevan

Dalam suatu penelitian, dukungan dari penelitian terdahulu yang relevan sangat penting. Penelitian terdahulu tersebut akan memberikan referensi dan perbandingan yang berguna dalam pelaksanaan penelitian yang sedang dilakukan. Penelitian relevan adalah penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dan memiliki hubungan dengan topik atau permasalahan yang sedang diteliti. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi dan perbandingan dalam proses penelitian yang dilakukan. Dengan demikian, melalui tinjauan literatur, peneliti menemukan beberapa penelitian relevan, di antaranya sebagai berikut:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh (Trisnawati, 2023) dalam *Journal of Geography Education Universitas Siliwangi* dengan judul “Partisipasi Masyarakat Dalam Penanggulangan Bencana Untuk Mewujudkan Kampung Siaga Bencana (KSB) di Desa Sindangjaya”. Penelitian ini bertujuan untuk memahami partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana, termasuk kegiatan yang dilakukan dan bentuk partisipasi serta kontribusi yang diberikan masyarakat untuk mewujudkan Kampung Siaga Bencana (KSB). Hasil dari penelitian ini adalah bentuk kegiatan dan partisipasi yang dilakukan masyarakat dalam penanggulangan bencana untuk mewujudkan Kampung Siaga Bencana (KSB), diantaranya terdapat *local leader* atau aktor yang terlibat dan berperan aktif dalam upaya penanggulangan bencana, seperti ketua RT, ketua RW, komunitas lokal (masyarakat), serta Tim Siaga Bencana. Selain itu, Partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana dapat dibagi menjadi lima jenis, yaitu partisipasi berupa pemikiran, keterampilan, tenaga, barang, dan uang. Bentuk-bentuk partisipasi ini telah terbentuk dan berkembang secara turun-temurun, terutama ketika terjadi bencana.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh (Dimaputri & Mujahidin, 2023) dalam Jurnal Pemerintahan Dan Keamanan Publik (JP dan KP) dengan judul “Optimalisasi Kampung Siaga Bencana Dalam Mitigasi Bencana Di Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur”. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran umum tentang optimalisasi Kampung Siaga Bencana

dalam upaya mitigasi bencana di Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur. Adapun hasil dari penelitian ini yaitu dimensi tujuan menunjukkan bahwa masyarakat telah memahami maksud dibentuknya KSB, namun belum sepenuhnya mengerti berbagai bentuk mitigasi bencana yang tersedia. Dimensi alternatif keputusan menunjukkan bahwa Dinas Sosial Kota Balikpapan memilih partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program KSB sebagai alternatif keputusan, dengan jumlah KSB yang telah dibentuk. Dimensi sumber daya mengungkapkan adanya keterbatasan anggaran dalam mengoptimalkan program KSB, kurangnya sarana dan prasarana yang memadai, serta keterbatasan jumlah tenaga ahli dalam bidang kebencanaan dari segi sumber daya manusia.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh (Suryati et al., 2023) dalam Jurnal Kesehatan Tambusai yang berjudul “Hubungan Persepsi Risiko Bencana Dan Keterikatan Tempat Terhadap Tingkat Kesiapsiagaan Bencana Alam Tanah Longsor Pada Masyarakat Di Kelurahan Kayu Kubu Bukittinggi”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji hubungan antara persepsi risiko bencana dan keterikatan tempat dengan tingkat kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana alam tanah longsor di Kelurahan Kayu Kubu, Kota Bukittinggi pada Tahun 2023. Pada penelitian ini diperoleh hasil yaitu terdapat hubungan antara persepsi risiko bencana dengan tingkat kesiapsiagaan bencana alam tanah longsor, dengan nilai p sebesar 0,022 ($p < 0,1$). Namun, tidak ditemukan hubungan antara keterikatan tempat dan kesiapsiagaan bencana tanah longsor, dengan nilai p sebesar 0,323 ($p > 0,1$). Masyarakat diharapkan dapat meningkatkan kesiapsiagaan terhadap bencana tanah longsor di wilayah mereka guna mengurangi dampak dari risiko bencana.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh (Laveda et al., 2024) dalam *Interdisciplinary Journal Of Public Affairs* yang berjudul “Pendekatan *Community Based Disaster Management* (CBDM) Melalui Kampung Siaga Bencana (KSB) di Kelurahan Jatibening”. Fokus pada penelitian ini membahas upaya penanggulangan bencana berbasis masyarakat di Indonesia melalui Kampung Siaga Bencana (KSB) di Kelurahan Jatibening Baru, Kota Bekasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan *Community Based Disaster Management* (CBDM) dalam

program Kampung Siaga Bencana (KSB) dengan fokus pada mitigasi bencana, prioritas penanganan, evaluasi kinerja dalam penanggulangan bencana, serta mobilisasi sumber daya. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa penanggulangan bencana dilakukan melalui tiga tahap yaitu: sebelum terjadi bencana, saat terjadi bencana, dan setelah bencana terjadi. Tujuan dari rangkaian kegiatan ini adalah untuk meminimalisir risiko bencana dan meningkatkan ketangguhan serta ketahanan masyarakat dalam menghadapi situasi tersebut. Peran aktif pemerintah serta partisipasi masyarakat sangat penting dalam mengelola risiko bencana secara efektif dan efisien. Beberapa faktor yang mendukung penerapan Community Based Disaster Management (CBDM) dalam Kampung Siaga Bencana (KSB) meliputi ketersediaan anggaran yang memadai, partisipasi warga, serta komunikasi yang baik antara para pemangku kepentingan. Sementara itu, faktor penghambat penerapan CBDM meliputi sosialisasi dan pelatihan yang belum optimal, keterbatasan gudang logistik, dan kurangnya ketegasan dalam penegakan aturan di Daerah Aliran Sungai (DAS).

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh (Julius et al., 2020) dalam Jurnal Swabumi dengan judul “Implementasi Program Desa Tangguh Bencana di Desa Gunung Geulis, Sukaraja, Bogor”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis: (1) partisipasi masyarakat Desa Gunung Geulis, khususnya kelompok rentan, dalam pengelolaan sumber daya untuk mengurangi risiko bencana; (2) peningkatan kapasitas masyarakat dan aparat dalam penanggulangan bencana; dan (3) kinerja forum Pengurangan Risiko Bencana (PRB) di desa tersebut. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa (1) anggota forum penanggulangan bencana melakukan penanaman pohon di lereng-lereng yang rawan longsor dan membangun tanggul panahan; (2) Desa Gunung Geulis, sebagai pelaksana program Desa Tangguh Bencana, telah secara aktif melaksanakan pelatihan rutin dan berkelanjutan setiap bulan untuk meningkatkan kapasitas dalam penanggulangan bencana; (3) forum PRB Desa Gunung Geulis telah melakukan upaya mitigasi pasif, seperti pemetaan dan analisis risiko bencana, meskipun belum ada dokumen yang disusun. Anggota PRB juga melakukan mitigasi dan peringatan dini dengan menyebarkan informasi melalui pamflet, brosur, dan pertemuan desa

lainnya. Selain itu, tim PRB telah melaksanakan upaya mitigasi aktif di Desa Gunung Geulis.

Keenam, penelitian yang dilakukan oleh (Saptadi & Djamal, 2012) dalam Jurnal Penanggulangan Bencana yang berjudul “Kajian Model Desa Tangguh Bencana Dalam Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Bersama BPBD D.I Yogyakarta”. Studi dan penelitian ini difokuskan untuk mendukung integritas masyarakat dalam mitigasi bencana, mendapatkan harmonisasi dan sinkronisasi kinerja program, dan memfasilitasi pelatihan penanggulangan bencana dan diskusi kelompok. Pada penelitian ini diperoleh hasil bahwa menggunakan model percontohan Desa Tangguh dapat meningkatkan proses pembelajaran individu masyarakat dalam menghadapi bencana. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa peran BPBD dalam mengatasi bencana alam akan terus dikembangkan di masa depan.

Berdasarkan penelitian relevan yang telah dilakukan sebelumnya terdapat perbedaan dari penelitian ini, yaitu penelitian yang akan dilakukan ini, berfokus pada salah satu implementasi program dari BNPB, yaitu Desa/Kelurahan Tangguh Bencana (Destana) mengenai peran Ketahanan Bencana Lingkungan Kelurahan (KBLK) dengan mendeskripsikan peran yang dilakukan KBLK dalam upaya mitigasi bencana, program KBLK dalam meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terkait mitigasi bencana, serta mengidentifikasi hambatan yang dialami KBLK dalam upaya mitigasi bencana dalam ruang lingkup Kelurahan Kayu Kubu Kota Bukittinggi. Sedangkan, penelitian relevan yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya pada umumnya membahas tentang implementasi program dari Kementerian Sosial, yaitu Kampung Siaga Bencana (KSB) mengenai sinergi pemerintah dan masyarakat dalam upaya mitigasi bencana. Selain itu, terdapat perbedaan dari segi metode penelitian, lokasi penelitian, serta fokus penelitian dari beberapa penelitian sebelumnya. Persamaan penelitian ini dengan penelitian relevan yang telah dilakukan sebelumnya adalah kesamaan dalam membahas tentang upaya mitigasi bencana yang dilakukan pemerintah, komunitas, dan masyarakat.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Pendekatan Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan menggunakan metode penelitian sosial kualitatif. Kemudian, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan penelitian adalah suatu cara pandang yang dipakai oleh peneliti untuk menyelesaikan dan menjawab permasalahan (Afrizal, 2014). Senada dengan hal itu, Taylor dan Bogdan (1984 : 1) dalam buku (Afrizal, 2014) yang berjudul “Metode Penelitian Kualitatif : Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu” menjelaskan pendekatan penelitian sebagai cara pandang yang digunakan oleh para peneliti untuk memecahkan masalah dan mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitiannya. Data yang diperoleh dalam penelitian kualitatif umumnya berbentuk kata-kata, baik lisan maupun tulisan, serta tindakan manusia, tanpa upaya untuk mengubahnya menjadi angka.

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan fenomena atau peristiwa yang terjadi di lapangan. Data yang dikumpulkan berupa kata-kata, baik lisan maupun tulisan, dari perilaku orang yang diamati. Dengan menggunakan tipe penelitian deskriptif, penelitian ini dapat mendeskripsikan dan menggambarkan dengan detail mengenai realitas sosial secara mendalam. Alasan peneliti menggunakan tipe penelitian deskriptif adalah untuk mendeskripsikan dan menggambarkan secara detail mengenai upaya Ketahanan Bencana Lingkungan Kelurahan (KBLK) dalam mengedukasi masyarakat tentang mitigasi bencana di Kelurahan Kayu Kubu Kota Bukittinggi.

1.6.2. Informan Penelitian

Setiap penelitian membutuhkan informan penelitian untuk memberikan kita informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Informan adalah individu yang memberikan informasi, baik tentang dirinya sendiri, orang lain, atau suatu peristiwa dan kejadian. Sedangkan, informan penelitian adalah individu yang memberikan informasi mengenai dirinya sendiri, orang lain, ataupun suatu peristiwa atau suatu hal kepada peneliti atau interviewer. Menurut (Afrizal, 2014) dalam penentuan

informan, terdapat dua klasifikasi/kategori informan, yaitu informan pelaku dan informan pengamat :

1. Informan Pelaku

Informan pelaku adalah individu yang memberikan informasi atau keterangan mengenai dirinya, mengenai perbuatannya, mengenai pikirannya, mengenai interpretasinya (maknanya), mengenai pengetahuannya. Secara sederhana, informan pelaku adalah subjek dari penelitian itu sendiri dan orang yang terlibat secara langsung dalam penelitian. Dalam penelitian ini, informan pelakunya adalah pengurus dan anggota KBLK.

2. Informan Pengamat

Informan pengamat adalah individu yang memberikan informasi atau keterangan mengenai orang lain atau suatu peristiwa atau suatu hal kepada peneliti. Secara sederhana, informan pengamat adalah orang yang mengetahui orang yang peneliti teliti atau pelaku peristiwa yang diteliti sebagai saksi atau pengamat suatu peristiwa. Dalam penelitian ini, informan pengamatnya adalah tokoh masyarakat, masyarakat lokal, serta pemangku kepentingan yang tidak terlibat secara langsung dalam penelitian.

Dalam sebuah penelitian, diperlukan teknik pemilihan informan sebelum melakukan penelitian. Penelitian ini menggunakan Teknik *purposive sampling* dalam pemilihan informan. Pada teknik *purposive sampling*, sebelum melakukan penelitian peneliti menetapkan kriteria dan karakteristik tertentu oleh individu yang akan dijadikan sebagai informan pelaku dan informan pengamat yang akan dijadikan sumber informasi. Sample yang dipilih dan ditentukan oleh peneliti bergantung pada tujuan penelitian. Adapun kriteria informan dalam penelitian ini yang mesti dipenuhi oleh informan pelaku adalah sebagai berikut :

1. Pengurus KBLK Kayu Kubu
2. Pembina KBLK Kayu Kubu

Sedangkan kriteria informan dalam penelitian ini yang mesti dipenuhi oleh informan pengamat adalah sebagai berikut :

1. Lurah/Kasi/Staff Kelurahan Kayu Kubu yang terlibat dalam penanganan bencana
2. Tokoh masyarakat dan masyarakat yang tinggal di Kelurahan Kayu Kubu
3. Kepala/Staff Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bukittinggi

Tabel 1.3 Informan Penelitian

No	Nama	Usia (Tahun)	Kriteria informan	Status
1.	Reynaldo Seichuba	47	Pelaku	Pendiri KBLK
2.	Ikhlas	52	Pelaku	Ketua KBLK
3.	Jimmi Syukri	45	Pelaku	Anggota KBLK
4.	Zhaki Arshid	48	Pelaku	Anggota KBLK
5.	Rio	42	Pelaku	Anggota KBLK
6.	Yennita Selvia Roza S.Sos	56	Pengamat	Lurah Kayu Kubu
7.	Advendri	47	Pengamat	Kasi Pemtrantibum
8.	Dodi Syukri	52	Pengamat	Ketua RW 02
9.	Pono	38	Pengamat	Warga
10.	Buk Yus	68	Pengamat	Warga
11.	Iben Achsan, S.H.	54	Pengamat	Kasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Bukittinggi

Sumber : Data Primer, 2025

1.6.3. Teknik Pengumpulan Data

Menurut (Afrizal, 2014), Dalam penelitian kualitatif, data yang dikumpulkan berupa kata-kata, baik lisan, tulisan, maupun tindakan manusia, dan tidak diubah menjadi data numerik. Dalam penelitian kualitatif terdapat dua jenis data, yaitu :

1. Data primer

Data primer merupakan data yang ditemukan dan didapatkan langsung dari informan, baik melalui observasi maupun wawancara mendalam. Pada penelitian ini, data primer diperoleh dari transkrip dan hasil wawancara dengan KBLK Kayu Kubu, Kasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD

Kota Bukittinggi, Lurah Kayu Kubu, pejabat kelurahan, RT, RW, dan masyarakat lokal. Selain itu, data primer juga dapat diperoleh dari hasil observasi seperti mengamati upaya KBLK Kayu Kubu dalam mengedukasi masyarakat tentang mitigasi bencana.

2. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang tidak ditemukan dan didapatkan langsung dari informan. Artinya data sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk dokumen, literatur, buku, media massa, atau informasi dari orang lain sebagai pendukung dan pembantu data primer. Secara sederhana, data sekunder bersifat penguat dan pelengkap dari data primer. Adapun data sekunder dalam penelitian ini berupa jurnal, dokumen kajian risiko bencana Kota Bukittinggi, dokumen KBLK Kayu Kubu, foto, data statistik yang dikeluarkan BPS, *website*, maupun informasi yang dipublikasikan.

Dalam penelitian kualitatif, peneliti perlu mengumpulkan data dengan teknik pengumpulan data yang memungkinkan peneliti untuk dapat mengangkakan data yang peneliti kumpulkan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif merupakan metode yang digunakan peneliti untuk memperoleh informasi, pemahaman, dan wawasan mengenai masalah yang diteliti. Adapun Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini, yaitu :

1. Wawancara Mendalam (*in-depth interviews*)

Wawancara mendalam atau *in-depth interview* adalah proses menggali informasi secara mendalam untuk memperoleh data yang rinci dan terbuka, guna mencapai tujuan penelitian. Menurut Taylor (1984 : 77) dalam (Afrizal, 2014), karena pewawancara harus mendalami informasi, wawancara perlu dilakukan secara berulang. Dengan kata lain, peneliti mengajukan pertanyaan yang berbeda kepada informan yang sama untuk mengklarifikasi informasi yang telah diperoleh dari wawancara sebelumnya. Oleh karena itu, pengulangan wawancara bertujuan untuk memperdalam sebuah informasi yang didapatkan. Karena proses ini

dilakukan hingga mendalami sebuah persoalan. Maka dari itu, wawancara seperti ini disebut wawancara mendalam.

Dalam penelitian ini yang diwawancarai adalah anggota KBLK Kayu Kubu yang bermaksud untuk mendapatkan informasi mengenai aktivitas, kegiatan, peran, serta upaya yang dilakukan KBLK Kayu Kubu dalam penanggulangan bencana khususnya dalam hal edukasi mitigasi bencana kepada masyarakat. Kemudian, wawancara juga dilakukan kepada perwakilan masyarakat seperti RT, RW, serta warga sekitar Kelurahan Kayu Kubu yang terlibat langsung dan mengamati kegiatan yang dilakukan oleh KBLK Kayu Kubu. Selain itu, wawancara juga dilakukan kepada pihak BPBD Kota Bukittinggi dan Lurah beserta Kasi sebagai pengamat kegiatan yang dilakukan oleh KBLK Kayu Kubu.

2. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan mengamati secara langsung kejadian di lapangan. Dalam metode ini, peneliti harus melihat, mendengar, dan mengalami sendiri apa yang sedang berlangsung atau dilakukan (Afrizal, 2014). Dalam observasi, peneliti harus terjun langsung ke lapangan untuk mengumpulkan data dengan cara mengamati setiap aktivitas yang dilakukan oleh informan. Observasi dalam penelitian ini mencakup pengamatan terhadap situasi dan kondisi di lokasi penelitian, termasuk aktivitas dan kegiatan masyarakat yang berlangsung di lokasi penelitian tersebut. Dalam penelitian ini, observasi yang dilakukan adalah mengamati aktivitas yang dilakukan oleh KBLK Kayu Kubu dalam penanggulangan dan mitigasi bencana.

3. Pengumpulan Dokumen

Pengumpulan dokumen adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan bahan-bahan tertulis seperti notulen, berita dari media massa, surat, dan laporan terkait untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan (Afrizal, 2014). Untuk memverifikasi kebenaran informasi yang diperoleh, peneliti juga perlu melakukan wawancara mendalam. Dokumen-dokumen yang diperoleh dalam penelitian ini dapat digunakan

untuk mencocokkan informasi yang ada di lapangan. Tanggal dan angka-angka dalam dokumen atau foto cenderung lebih akurat dibandingkan hasil wawancara mendalam. Dalam penelitian ini, studi dokumen berupa jurnal, penelitian terdahulu, dokumen KRB, buku yang berkaitan dengan kebencanaan. Peneliti juga meninjau dokumen pendukung dari KBLK Kayu Kubu berupa SK Kepengurusan KBLK Kayu Kubu dan dokumentasi berupa foto-foto kegiatan KBLK.

1.6.4. Proses Penelitian

Penelitian ini dimulai pada bulan September 2024, tepatnya pada awal bulan September 2024 peneliti memulai untuk menentukan tema dan topik penelitian dengan menentukan fokus penelitian, yaitu sosiologi kebencanaan. Topik penelitian yang diteliti adalah tentang Kelompok Siaga Bencana (KSB) atau Satgas PB (Penanggulangan Bencana) yang merupakan sebutan komunitas relawan bencana yang ada di beberapa daerah. Namun, di Kota Bukittinggi komunitas relawan bencana tersebut bernama KBLK (Ketahanan Bencana Lingkungan Kelurahan), berbeda dengan komunitas relawan bencana di daerah lain. Hal tersebut yang membuat peneliti tertarik untuk lebih mempelajari dan mencari beberapa informasi di internet tentang KBLK di Kota Bukittinggi dan mendapatkan bahwa KBLK di Kelurahan Kayu Kubu aktif melakukan kegiatan penanggulangan bencana. Disamping itu, Kelurahan Kayu Kubu juga merupakan daerah yang masuk ke dalam zona rawan tinggi terhadap bencana.

Pada tanggal 19 September 2024 peneliti melakukan observasi awal dan mewawancarai salah satu staff bidang pemtrantibum Kelurahan Kayu Kubu yang sebelumnya merupakan mantan staff bidang pencegahan dan kesiapsiagaan BPBD Kota Bukittinggi untuk mencari informasi lebih lanjut mengenai KBLK di Kota Bukittinggi dan Kelurahan Kayu Kubu. Setelah melakukan observasi awal, peneliti mulai membuat rancangan penelitian berupa, *Term of Reference* dan disetujui oleh pembimbing. Pada awal bulan Oktober 2024, *Term of Reference* dari peneliti disetujui dalam rapat departemen. Peneliti memulai penulisan proposal penelitian dan bimbingan proposal selama Bulan Oktober 2024. Ketika penulisan proposal

penelitian peneliti kembali mendatangi lokasi penelitian untuk mencari data dan informasi yang diperlukan dalam proposal penelitian, hingga pada tanggal 26 November 2024 melaksanakan seminar proposal penelitian.

Setelah melaksanakan seminar proposal, peneliti melakukan revisi dari saran dan kritikan dosen penguji dan mendiskusikannya dengan dosen pembimbing. Kemudian, peneliti membuat instrument penelitian dan pedoman wawancara. Ketika pedoman wawancara disetujui oleh dosen pembimbing, pada akhir bulan Desember 2024 hingga awal Februari 2025 bertepatan dengan libur semester ganjil peneliti melakukan penelitian dan pengumpulan data. Pada tahap ini, peneliti langsung menemui Lurah, Kepala Seksi, beserta staff Kelurahan Kayu Kubu untuk mengumpulkan data dan informasi yang valid tentang gambaran umum lokasi penelitian dan demografi masyarakat di Kelurahan Kayu Kubu untuk penulisan bab II deskripsi lokasi penelitian.

Dari akhir tahun 2024 hingga sepanjang bulan Januari 2025, peneliti rutin melakukan pengumpulan data, melakukan observasi, dan melakukan wawancara dengan informan, baik informan pelaku, yaitu anggota KBLK Kayu Kubu mulai dari ketua, sekretaris, dan anggota KBLK maupun informan pengamat, seperti Lurah, Kepala Seksi, RT, RW, dan masyarakat Kelurahan Kayu Kubu. Pada tahap ini, peneliti pertama kali mewawancarai Lurah Kayu Kubu pada tanggal 30 Desember 2024. Peneliti langsung mendatangi Kantor Lurah Kayu Kubu untuk menemui Lurah Kayu Kubu, yaitu Yennita Selvia Roza, S.Sos. Ketika berada di Kantor Lurah Kayu Kubu, kebetulan Lurah sedang berada di tempat dan dengan senang hati bersedia untuk diwawancarai. Pada saat itu, peneliti langsung memperkenalkan diri, menyampaikan maksud serta tujuan dari peneliti untuk melakukan penelitian tentang KBLK Kayu Kubu, dan langsung mewawancarai Lurah Kayu Kubu. Setelah kurang lebih 30 menit peneliti melakukan wawancara dengan Lurah Kayu Kubu, kemudian peneliti meminta kontak dan alamat dari ketua KBLK dan beberapa anggota KBLK Kayu Kubu kepada Lurah. Pada saat itu, Lurah langsung memberikan kontak dari Ikhlas selaku ketua KBLK Kayu Kubu dan salah satu anggota KBLK Kayu Kubu, yaitu Jimmi Syukri, serta Lurah juga mengarahkan

peneliti untuk bertanya dan menggali informasi tentang KBLK kepada Reynaldo selaku pendiri KBLK yang pernah peneliti wawancarai saat observasi awal penelitian. Hal itu disebabkan karena menurut Lurah Kayu Kubu, Reynaldo adalah orang yang tepat diwawancarai tentang KBLK ini karena beliau berpengalaman di bidang kebencanaan. Kemudian, peneliti mencari Reynaldo pada hari itu juga, akan tetapi Reynaldo sedang tidak berada di Kantor pada saat itu karena ada urusan di luar. Siang harinya, peneliti mendatangi Kantor BPBD Kota Bukittinggi untuk memberikan surat izin penelitian dan mengurus administrasi penelitian. Keesokan harinya peneliti mencoba menghubungi Ikhlas selaku ketua KBLK Kayu Kubu melalui pesan *WhatsApp* dengan memperkenalkan diri, menyampaikan maksud dan tujuan, serta menanyakan kesediaan waktu dan tempat dari Ikhlas untuk melakukan wawancara. Lalu, Ikhlas merespon positif dengan senang hati dan menyampaikan terima kasih atas perhatiannya kepada KBLK Kayu Kubu serta bersedia untuk diwawancarai dan menyuruh peneliti untuk datang ke rumahnya esok hari.

Pada tanggal 1 Januari 2025, peneliti mendatangi rumah dari Ikhlas untuk melakukan wawancara, Ikhlas selaku ketua KBLK Kayu Kubu sangat mendukung dan memotivasi peneliti untuk menulis skripsi tentang KBLK ini karena menurutnya baru sedikit mahasiswa yang menulis tentang kebencanaan. Pada tanggal 2 Januari 2025, peneliti dihubungi kembali oleh pegawai BPBD Kota Bukittinggi untuk memberitahukan bahwa surat izin sudah disetujui dan menyuruh peneliti untuk datang ke Kantor BPBD Kota Bukittinggi untuk menemui Kasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan pada esok hari. Pada tanggal 3 Januari 2025, peneliti datang ke kantor BPBD Kota Bukittinggi menemui dan mewawancarai Kasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Bukittinggi, yaitu Iben Achsan, S.H. Namun, informasi yang peneliti dapatkan dari BPBD Kota Bukittinggi kurang memuaskan dikarenakan pejabat struktural di BPBD Kota Bukittinggi kurang mengetahui tentang KBLK dan pada umumnya baru menjabat. Kondisi dan permasalahan tersebut juga diakui langsung oleh Iben Achsan, S.H. Hal itu disebabkan karena dampak dari mutasi ASN di lingkungan pemerintah daerah Kota Bukittinggi. Karena keadaan tersebut, peneliti mengalami kendala terkait informan dari BPBD. Peneliti pun melakukan konsultasi dengan dosen pembimbing

mengenai permasalahan tersebut dan mendapatkan saran untuk mencari pegawai yang lama di BPBD sebagai informan.

Selanjutnya, pada tanggal 7 Januari 2025 peneliti kembali mendatangi Kantor Lurah Kayu Kubu untuk menemui Reynaldo. Akan tetapi, beliau pada hari itu tidak masuk kantor karena anaknya sakit. Kemudian, peneliti berbincang mengenai Kelurahan Kayu Kubu sekaligus melakukan wawancara tentang KBLK dengan Advendri, S.E selaku Kasi Pemtrantibum yang kebetulan sedang berada di Kantor. Keesokan harinya, 8 Januari 2025 kembali mendatangi Kantor Lurah Kayu Kubu untuk menemui Reynaldo untuk melakukan wawancara yang pada hari itu sudah kembali masuk bekerja. Peneliti kembali memperkenalkan diri dan ternyata Reynaldo masih mengingat peneliti yang ketika bulan September 2024 melakukan observasi awal. Ternyata Reynaldo adalah pendiri KBLK di Kota Bukittinggi ini dan merupakan pegawai lama di BPBD. Kemudian, peneliti menggali informasi secara mendalam dan lebih detail kepada Reynaldo mengenai KBLK. Beliau mendukung penuh penelitian ini dan bersedia dihubungi kapanpun jika peneliti memerlukan bantuan.

Pada tanggal 17 Januari 2025, peneliti kembali bertemu dengan Reynaldo selaku pendiri KBLK. Kali ini peneliti dengan Reynaldo membicarakan tentang kegiatan-kegiatan KBLK dan riwayat kejadian bencana yang pernah melanda Kelurahan Kayu Kubu. Setelah itu, Reynaldo mengajak peneliti ke wilayah Ngarai Sianok, menunjukkan langsung tempat-tempat yang terdampak bencana, dan menceritakan kondisi pada saat bencana tersebut terjadi. Kemudian, Reynaldo mengajak peneliti juga untuk bertemu dengan Zhaki salah satu anggota KBLK Kayu Kubu yang merupakan Ketua RT dan bekerja sebagai pegawai kontrak tim reaksi cepat BPBD Kota Bukittinggi. Kesempatan ini juga peneliti memanfaatkan untuk melakukan wawancara dengan Zhaki mengenai KBLK dan meminta beberapa dokumentasi kegiatan KBLK Kayu Kubu. Selanjutnya, pada tanggal 23 Januari 2025 peneliti kembali menemui Zhaki di kedainya untuk menanyakan informasi lebih lanjut mengenai KBLK Kayu Kubu. Di kedai tersebut juga ada Kayo teman dari Zhaki yang juga bekerja sebagai TRC BPBD Kota Bukittinggi

yang baru pulang dinas serta ada beberapa warga yang duduk sambil ngopi di kedai tersebut. Pada saat itu, peneliti juga berbincang dengan Kayo dan juga beberapa warga mengenai KBLK dan bencana. Setelah itu, peneliti juga meminta kontak dari ketua RW yang bernama Dodi Syukri kepada Zhaki dan di siang harinya peneliti langsung menghubungi beliau. Namun, Dodi baru memberi kabar melalui pesan WhatsApp pada sore harinya dan mengajak bertemu setelah waktu maghrib di rumahnya. Pada malam harinya peneliti mendatangi rumah Dodi dan langsung melakukan wawancara. Informasi yang didapatkan dari Dodi selaku Ketua RW sangat membantu peneliti dalam penulisan skripsi.

Pada tanggal 30 Januari 2025, di pagi harinya peneliti melakukan observasi ke daerah Ngarai Sianok dan mendatangi beberapa warga dan pedagang untuk mengumpulkan data dan informasi mengenai KBLK Kayu Kubu. Kemudian setelah itu, peneliti kembali menemui Reynaldo dan Zhaki untuk meminta beberapa dokumentasi pendirian KBLK di Kota Bukittinggi. Pada siang harinya peneliti mendatangi Kantor Lurah Kayu Kubu untuk menemui Jimmi dan Rio yang sebelumnya sudah peneliti hubungi untuk melakukan wawancara dan Jimmi mengajak bertemu di Kantor Lurah Kayu Kubu.

Pada tahap berikutnya, peneliti melakukan proses penulisan skripsi yang diawali dengan membuat transkrip wawancara bersama informan dan menganalisis data yang didapatkan selama penelitian. Setelah membuat hasil wawancara, peneliti mengelompokkan informasi dari hasil wawancara sesuai dengan tujuan penelitian dan melakukan triangulasi data dari berbagai sumber untuk memvalidasi kualitas data. Setelah tahap ini, data dan informasi disajikan dalam bab III berdasarkan hasil analisis data dan hasil wawancara yang telah dikelompokkan. Proses analisis data ini peneliti lakukan secara *on going* dengan proses penelitian dan pengumpulan data dari akhir Desember 2024 hingga akhir Januari 2025. Kemudian, selama bulan Februari peneliti mulai rutin menulis setiap harinya bagian bab III pembahasan dalam skripsi. Peneliti juga terus berinteraksi dengan dosen pembimbing sejak seminar proposal dan rutin berdiskusi dalam bimbingan hasil penelitian dan proses penulisan skripsi.

1.6.5. Unit Analisis

Penelitian kualitatif memerlukan unit analisis data. Unit analisis bertujuan untuk membantu menentukan fokus kajian dan objek penelitian sesuai dengan masalah yang diteliti. Unit analisis dalam penelitian dapat berupa individu, kelompok, atau institusi. Pemilihan unit analisis dalam penelitian kualitatif sangat penting karena akan mempengaruhi cara peneliti mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data. Peneliti harus memastikan bahwa unit analisis yang dipilih sesuai dengan tujuan serta pertanyaan penelitian yang ingin dijawab. Keberadaan unit analisis penting bagi peneliti agar validitas dan reliabilitas penelitian dapat terjaga. Pada penelitian ini yang menjadi unit analisisnya adalah kelompok, yaitu Ketahanan Bencana Lingkungan Kelurahan (KBLK).

1.6.6. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi bagian-bagian serta hubungan antar bagian dan keseluruhan data yang telah dikumpulkan, sehingga dapat menghasilkan klasifikasi atau tipologi (Afrizal, 2014). Aktivitas peneliti dalam menganalisis data pada penelitian kualitatif meliputi penentuan data yang penting, interpretasi, pengelompokan ke dalam kategori tertentu, dan pencarian hubungan antar kelompok (Afrizal, 2014).

Peneliti menggunakan analisis data Miles dan Huberman dalam penelitian ini yang merujuk pada (Afrizal, 2014) dalam bukunya yang berjudul “Metode Penelitian Kualitatif : Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu”. Miles dan Huberman membagi analisis data kedalam tiga tahap, yaitu :

1. Kodifikasi Data

Kodifikasi data merupakan tahap pengkodean atau pemberian kode atau penamaan terhadap data. Artinya peneliti memberikan nama atau penamaan terhadap hasil penelitian. Data yang diperoleh melalui wawancara akan dibaca kembali dalam bentuk catatan lapangan atau transkrip, kemudian diberi label atau tanda berdasarkan kriteria untuk diklasifikasikan. Selanjutnya, informasi akan dipilah menjadi penting dan

tidak penting. Peneliti dapat fokus pada informasi yang dianggap penting sesuai dengan data yang dicari dan yang mendukung penelitian. Hasil dari tahap ini berupa tema atau klasifikasi hasil penelitian yang telah diberi nama. Pada penelitian ini, peneliti menuliskan catatan-catatan penting dalam penelitian. Untuk hasil wawancara peneliti merekam secara langsung wawancara tersebut. Kemudian, rekaman wawancara tersebut peneliti pindahkan ke dalam bentuk transkrip wawancara. Setelah itu, peneliti kembali membaca dan mulai mereduksi data beserta informasi yang penting dan tidak penting dengan cara menandainya.

2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan tahap lanjutan atau tahap berikutnya dalam analisis data. Dalam tahap ini, peneliti menyajikan temuan penelitian dalam bentuk kategori atau pengelompokan. Dalam hal ini, Miles dan Huberman merekomendasikan penggunaan matriks atau diagram untuk menyajikan hasil penelitian agar lebih efektif. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan matriks untuk mengelompokkan informasi mengenai upaya KBLK Kayu Kubu dalam mengedukasi masyarakat tentang mitigasi bencana.

3. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi

Penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah tahap lanjutan pada analisis data. Pada tahap ini, peneliti menarik kesimpulan dari temuan data yang telah disajikan dan diinterpretasikan dari temuan wawancara atau dokumen yang diperoleh di lapangan. Setelah kesimpulan diperoleh, peneliti memeriksa kembali kevalidan interpretasi data dengan mengevaluasi atau memeriksa kembali koding dan penyajian data untuk memastikan tidak ada kesalahan dalam analisis data.

1.6.7. Definisi Operasional

Definisi operasional konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Ketahanan Bencana Lingkungan Kelurahan (KBLK)

Ketahanan Bencana Lingkungan Kelurahan (KBLK) merupakan suatu sistem pengelolaan sumber daya lingkungan dalam rangka mewujudkan keselamatan dan keamanan lingkungan dari bencana. Ketahanan Bencana Lingkungan Kelurahan yang selanjutnya disingkat KBLK adalah kesatuan tindakan masyarakat di lingkungan Kelurahan yang telah diberikan keterampilan khusus dalam menanggulangi ancaman bencana penanggulangan kebakaran dan bencana lainnya.

2. Edukasi

Edukasi adalah proses penyampaian ilmu pengetahuan kepada individu atau kelompok melalui pengajaran dan penanaman nilai-nilai, norma-norma sosial, dan pengetahuan dengan tujuan untuk membentuk individu dalam memahami status, peran dan tanggung jawabnya dalam masyarakat.

3. Mitigasi

Mitigasi merupakan serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Mitigasi bencana adalah suatu usaha dan upaya yang dilakukan untuk menekan dan mengurangi risiko dan dampak bencana dengan tujuan mengendalikan atau meminimalisir kerusakan dan kekacauan yang ditimbulkan akibat bencana, sehingga jumlah korban, kerusakan, dan kerugian dapat dikurangi.

4. Bencana

Bencana adalah serangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

1.6.8. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dikatakan sebagai tempat atau wilayah dari penelitian yang dilakukan. Selain itu, lokasi penelitian juga merujuk pada setting atau konteks dari suatu penelitian (Afrizal, 2014). Lokasi penelitian ini dilakukan di Kota

Bukittinggi, tepatnya di Kelurahan Kayu Kubu. Alasan peneliti memilih lokasi tersebut adalah Kelurahan Kayu Kubu merupakan zona rawan tinggi terhadap potensi bencana dikarenakan terletak di dekat Ngarai Sianok. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bukittinggi Tahun 2010-2030, dinyatakan bahwa sepanjang kawasan Ngarai Sianok dan wilayah di sekitarnya, termasuk dalam radius 50 meter dari bibir Ngarai, tergolong sebagai wilayah dengan risiko bencana yang tinggi.

1.6.9. Jadwal Penelitian

Penelitian ini dilakukan selama 4 bulan, terhitung mulai dari bulan November 2024 dilakukan penyusunan instrumen penelitian dan pedoman wawancara. Selanjutnya proses pengumpulan data dilakukan pada bulan Desember 2024 sampai Feberuari 2025. Kemudian pada bulan Februari sampai Maret 2025 dilakukan analisis data serta penulisan dan bimbingan skripsi. Setelah itu pada bulan April 2025 peneliti melaksanakan ujian skripsi. Berikut disajikan tabel jadwal penelitian dalam penulisan skripsi sebagai berikut :

Tabel 1.4 Jadwal Penelitian

No.	Nama kegiatan	2024		2025			
		Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr
1.	Penyusunan instrumen penelitian						
2.	Pengumpulan dan Analisis Data						
3.	Penulisan laporan penelitian						
4.	Bimbingan dan Revisi						
5.	Ujian Skripsi						